

Peningkatan Literasi BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah (BPU) pada UMKM Kecamatan Sepatan Timur Tangerang

Herlina¹, Lia Ira Sahara², Dina Aulia³, Ani Kusumaningsih⁴, Sugiyanto⁵

Universitas Pamulang, Indonesia

herlinasantika02@gmail.com¹, liairasahara@gmail.com², dina24289@gmail.com³

dosen02113@unpam.ac.id⁴, dosen00495@unpam.ac.id⁵

Submitted: 17th May 2026 | **Edited:** 30th June 2026 | **Issued:** 01st July 2026

Cited on: Herlina, H., Sahara, L. I., Aulia, D., Kusumaningsih, A., & Sugiyanto, S. (2026). Peningkatan Literasi BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah (BPU) pada UMKM Kecamatan Sepatan Timur Tangerang. *Jurnal PKM Manajemen Bisnis*, 6(2), 682-695.

ABSTRACT

East Sepatan District has significant potential for MSMEs as economic drivers, but they are vulnerable to occupational risks due to a lack of social safety nets. This Community Service (PKM) activity aims to improve literacy regarding the BPJS Ketenagakerjaan Non-Wage Recipients (BPU) among MSMEs in the region. Observations revealed that 90% of business owners had not yet participated in the Old Age Security (JHT) program, and 30% had inactive membership due to delinquent contributions. The methods used were interactive outreach and direct counseling regarding early protection and retirement financial planning. The results of the activity demonstrated an increase in partners' understanding of the importance of active participation via the JMO application, accident insurance benefits, and JHT savings management. Through this program, MSMEs in East Sepatan can operate their businesses with a sense of security.

Keywords: BPJS Ketenagakerjaan BPU, MSMEs, Social Security Literacy, East Sepatan

PENDAHULUAN

UMKM merupakan salah satu komponen penting dalam struktur perekonomian daerah karena berperan dalam menciptakan lapangan kerja, menyediakan sumber pendapatan masyarakat, serta menggerakkan aktivitas ekonomi lokal. Karakteristik UMKM yang umumnya memiliki keterbatasan modal, skala usaha relatif kecil, serta penggunaan tenaga kerja keluarga maupun tenaga kerja informal menyebabkan kelompok ini memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap berbagai risiko ekonomi dan ketenagakerjaan. Badan Pusat Statistik (2024) menjelaskan bahwa industri mikro dan kecil memiliki karakteristik berupa keterbatasan modal, pemanfaatan tenaga kerja keluarga, serta kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan pasar lokal. Pada saat yang sama, International Labour Organization (ILO, 2024) menegaskan bahwa pekerja pada usaha mikro dan kecil serta pekerja mandiri cenderung memiliki tingkat perlindungan sosial yang lebih rendah dibandingkan pekerja pada perusahaan

yang lebih besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan UMKM tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mengelola kegiatan usaha, tetapi juga oleh kemampuan pelaku usaha dalam mengelola risiko yang dapat mengganggu keberlanjutan pendapatan dan kehidupan ekonomi mereka.

Salah satu bentuk perlindungan yang relevan bagi pelaku UMKM adalah jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi kelompok Bukan Penerima Upah (BPU) yang menjalankan aktivitas ekonomi secara mandiri. Perlindungan tersebut menjadi penting karena pelaku usaha dapat menghadapi risiko kecelakaan kerja, kematian, maupun kebutuhan finansial pada masa tua tanpa memiliki mekanisme perlindungan yang secara otomatis disediakan oleh pemberi kerja. World Bank (2020) menyatakan bahwa keberadaan sektor informal yang persisten merupakan salah satu tantangan utama dalam pengembangan sistem perlindungan sosial di Indonesia, sementara ILO (2022a) menempatkan perluasan cakupan perlindungan sosial bagi pekerja informal sebagai persoalan penting karena karakteristik pekerjaan informal sering kali menyulitkan perluasan kepesertaan. Dalam konteks Indonesia, ILO (2022b) juga menunjukkan bahwa pekerja informal dan UMKM merupakan kelompok yang mengalami kerentanan terhadap perubahan kondisi pasar kerja dan guncangan ekonomi. Dengan demikian, kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan bagi pelaku UMKM BPU tidak semata-mata berkaitan dengan kepatuhan administratif, tetapi merupakan bagian dari strategi pengelolaan risiko sosial dan ekonomi bagi keberlangsungan usaha dan kesejahteraan pelaku UMKM.

Permasalahan tersebut juga tercermin pada kondisi awal pelaksanaan kegiatan PKM pada pelaku UMKM di Kecamatan Sepatan Timur, Tangerang. Berdasarkan hasil observasi awal yang menjadi dasar kegiatan, sekitar 90% pemilik usaha belum mengikuti program Jaminan Hari Tua (JHT), sedangkan sekitar 30% peserta yang telah memiliki kepesertaan mengalami status tidak aktif akibat adanya tunggakan iuran. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan program perlindungan sosial dengan pemahaman dan praktik kepesertaan pada kelompok sasaran. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Ardianingsih, Langelo, dan Wicaksono (2021) yang menemukan bahwa rendahnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja sektor informal berkaitan dengan kurangnya sosialisasi, ketidaktahuan mengenai prosedur pendaftaran, serta persepsi mengenai besarnya biaya

iuran. Adisty, Mundandar, dan Sumertajaya (2023) juga menunjukkan bahwa cakupan jaminan sosial bagi pekerja informal di Indonesia masih rendah dan bahwa keputusan untuk mendaftarkan diri dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan persepsi serta perilaku pekerja terhadap jaminan sosial. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan yang dihadapi mitra bukan hanya keterbatasan akses terhadap program, tetapi juga keterbatasan literasi mengenai manfaat, prosedur, kewajiban iuran, dan keberlanjutan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan BPU.

Secara teoritis, peningkatan literasi menjadi salah satu pendekatan penting untuk mendorong perubahan pengetahuan, kesadaran, dan perilaku masyarakat dalam memanfaatkan produk perlindungan sosial. Literasi mengenai jaminan sosial tidak hanya mencakup kemampuan mengenali program, tetapi juga pemahaman terhadap manfaat, risiko yang dilindungi, mekanisme kepesertaan, kewajiban pembayaran iuran, serta kemampuan memanfaatkan layanan yang tersedia. Anwar, Mulyati, dan Rahmawati (2023) menemukan bahwa tingkat kesadaran pekerja sektor informal berkaitan dengan niat untuk memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga peningkatan pemahaman menjadi bagian penting dalam mendorong kepesertaan. Sementara itu, Tarisha et al. (2021) menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki keterkaitan dengan perilaku menabung pada pelaku UMKM, yang mengindikasikan pentingnya kemampuan memahami dan merencanakan aspek keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam konteks kegiatan ini, pemahaman mengenai JHT dapat ditempatkan sebagai bagian dari perencanaan keuangan jangka panjang, sedangkan pemahaman mengenai Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dapat menjadi bagian dari strategi perlindungan terhadap risiko yang dapat mengganggu keberlangsungan pendapatan dan usaha.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan PKM “Peningkatan Literasi BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah (BPU) pada UMKM Kecamatan Sepatan Timur Tangerang” menjadi relevan dan memiliki urgensi untuk dilaksanakan. Kegiatan ini diarahkan tidak hanya untuk menyampaikan informasi mengenai program BPJS Ketenagakerjaan, tetapi juga membangun pemahaman praktis mengenai pentingnya kepesertaan aktif, manfaat perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja, pengelolaan tabungan JHT, serta pemanfaatan layanan digital melalui aplikasi JMO. Penguatan literasi tersebut penting karena sistem perlindungan sosial membutuhkan partisipasi

aktif pekerja dan pelaku usaha agar manfaatnya dapat berjalan secara berkelanjutan. ILO (2022c) menekankan bahwa perluasan perlindungan sosial bagi pekerja informal membutuhkan pendekatan yang mampu menjawab karakteristik dan hambatan spesifik kelompok sasaran, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan (2023) menunjukkan pengembangan layanan digital JMO yang semakin mendukung akses peserta, termasuk fitur bagi segmen BPU. Oleh karena itu, kegiatan edukasi dan pendampingan secara langsung diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pengetahuan, meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan sosial, serta mendorong pelaku UMKM di Kecamatan Sepatan Timur untuk mempertahankan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara aktif sebagai bagian dari pengelolaan risiko dan perencanaan keberlanjutan usaha.

METODE

Kerangka Pemecahan Masalah

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) mengoptimalkan kepesertaan dengan menasar usaha kecil menengah (UKM) dan pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU). Hingga akhir tahun 2024, BPJS Ketenagakerjaan telah melindungi 45,2 juta pekerja di Indonesia yang mayoritas dari sektor formal sebanyak 35,3 juta pekerja, sementara 9,9 juta lainnya merupakan BPU. Sedangkan potensi perluasan kepesertaan masih sangat besar, yakni mencapai 101,8 juta orang. Dari total tersebut, sekitar 40,7 juta atau 40 persen merupakan pekerja formal, di mana tingkat cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di sektor ini telah mencapai 86,7 persen. Untuk mencapai target kepesertaan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menerapkan berbagai langkah strategis. Salah satunya melalui sosialisasi dan edukasi masif guna meningkatkan literasi serta kesadaran pekerja akan pentingnya perlindungan jaminan sosial.

Realisasi Pemecahan Masalah

Dengan adanya sosialisasi dan edukasi literasi secara adaptif dengan memanfaatkan platform digital yang sesuai dengan karakter masing-masing pekerja. Dengan demikian, informasi dapat lebih mudah diakses dan dipahami, sehingga kesadaran pekerja terhadap pentingnya perlindungan sosial semakin meningkat. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga memperkuat sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, terutama dalam upaya melindungi pekerja rentan. Beberapa pemerintah daerah telah menerbitkan perda dan mengalokasikan anggaran untuk perlindungan pekerja

rentan di wilayahnya.

Khalayak Sasaran

Setengah dari pekerja BPU merupakan pekerja rentan. Risiko kecelakaan kerja yang mereka hadapi dapat berujung pada kemiskinan yang lebih dalam. Oleh karena itu pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan guna memastikan seluruh pekerja rentan memiliki jaring pengaman sosial yang kuat dan berkelanjutan. Dengan adanya peran aktif pemerintah daerah dalam meningkatkan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Diharapkan langkah ini dapat menginspirasi daerah lainnya, sehingga semakin banyak pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan. Tahun ini BPJS fokus mengoptimalkan perluasan kepesertaan pada sektor formal, khususnya pekerja UKM. Pemerintah juga tengah serius mengembangkan sektor tersebut. Selain memberikan kemudahan akses pendanaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah juga mendorong para penerima KUR untuk memiliki perlindungan jaminan sosial. Potensi kepesertaan BPU masih sangat besar. Dari total 61 juta, saat ini baru 9,9 juta yang terlindungi, atau sekitar 16,2 persen dan peningkatan kepesertaan di sektor ini tetap menjadi prioritas.

Tempat Waktu

Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan di aula serba guna kantor Kecamatan Sepatan Timur kabupaten Tangerang pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Dibimbing oleh tim pelaksana yang terdiri dari para pengajar Universitas Pamulang, dengan melibatkan peran instansi terkait.

Metode Kegiatan

Langkah-langkah yang diambil untuk mencapai sasaran kegiatan ini melibatkan instansi terkait yaitu pendekatan kepada pelaku UMKM Kecamatan Sepatan Timur melalui sosialisasi sebagai upaya mengurangi risiko agar terlindungi jaminan sosialnya. Langkah selanjutnya adalah memberikan penyuluhan mengenai Peningkatan Literasi BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah (BPU) Kecamatan Sepatan Timur.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan tema "Peningkatan Literasi BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah (BPU) pada UMKM Kecamatan Sepatan Timur" telah dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 10 Mei 2026, bertempat

di Aula Serbaguna Kantor Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang. Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan memberikan edukasi kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui program BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah (BPU).

Sasaran kegiatan adalah para pelaku UMKM yang menjalankan usaha secara mandiri di wilayah Kecamatan Sepatan Timur. Kelompok ini dipilih karena sebagian besar termasuk pekerja sektor informal yang memiliki risiko kerja cukup tinggi, namun belum seluruhnya memperoleh perlindungan jaminan sosial. Berdasarkan hasil observasi awal, masih ditemukan pelaku UMKM yang belum memahami manfaat program BPJS Ketenagakerjaan, khususnya mengenai Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Selain itu, terdapat peserta yang belum mengetahui prosedur pendaftaran, mekanisme pembayaran iuran, maupun tata cara pengajuan klaim apabila terjadi risiko kerja.



Gambar 1. Koordinasi dengan Pihak Kecamatan Sepatan Timur

Sebelum pelaksanaan kegiatan, tim PKM melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan Sepatan Timur untuk memperoleh izin pelaksanaan sekaligus menentukan jadwal kegiatan. Tahap persiapan juga meliputi penyusunan materi penyuluhan, pembagian tugas anggota tim, penyediaan media presentasi, pencetakan materi pendukung, serta koordinasi dengan peserta yang akan mengikuti kegiatan. Persiapan yang matang dilakukan agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung secara

efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.



Gambar 2. Proses Registrasi Peserta

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan proses registrasi peserta, dilanjutkan dengan pembukaan oleh perwakilan Kecamatan Sepatan Timur dan tim pelaksana PKM Universitas Pamulang. Dalam sambutannya, pihak kecamatan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan edukasi mengenai BPJS Ketenagakerjaan, mengingat masih banyak pelaku UMKM yang membutuhkan informasi mengenai perlindungan sosial ketenagakerjaan.



Gambar 3. Pemaparan Materi Oleh Pemateri 1



Gambar 4. Pemaparan Materi Oleh Pemateri 2

Kegiatan inti berupa penyuluhan dilaksanakan secara interaktif melalui pemaparan materi oleh narasumber dari tim PKM. Materi yang disampaikan meliputi pengenalan BPJS Ketenagakerjaan, klasifikasi peserta penerima upah dan bukan penerima upah, manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), prosedur pendaftaran peserta BPU, mekanisme pembayaran iuran, serta pemanfaatan aplikasi JMO sebagai sarana pelayanan digital BPJS Ketenagakerjaan. Penyampaian materi dilakukan menggunakan media presentasi yang disesuaikan dengan karakteristik peserta sehingga informasi dapat dipahami dengan lebih mudah.



Gambar 5. Sesi Diskusi dan Tanya Jawab

Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Pada sesi ini peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai pertanyaan mengenai pengalaman mereka selama mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan maupun kendala yang dihadapi. Beberapa peserta mengungkapkan bahwa mereka belum mengikuti program JHT karena menganggap manfaatnya belum dirasakan secara langsung. Sebagian peserta lainnya menyampaikan bahwa status kepesertaan menjadi tidak aktif akibat keterlambatan pembayaran iuran. Permasalahan tersebut kemudian dijelaskan oleh narasumber beserta alternatif penyelesaiannya, sehingga peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hak dan kewajiban sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan lancar dan mendapat respons positif dari peserta. Hal ini terlihat dari tingginya partisipasi peserta selama sesi diskusi, antusiasme dalam mengajukan pertanyaan, serta keterlibatan aktif dalam simulasi penggunaan aplikasi JMO. Suasana kegiatan yang komunikatif menunjukkan bahwa metode penyuluhan interaktif mampu meningkatkan minat peserta dalam memahami materi yang disampaikan.

Hasil Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan memberikan hasil yang positif terhadap peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta hanya mengenal BPJS Kesehatan dan belum memahami perbedaan fungsi BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja bukan penerima upah (BPU). Setelah mengikuti kegiatan, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat program JKK, JKM, dan JHT sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja, kematian, maupun persiapan finansial pada masa tidak produktif.

Selain meningkatnya pemahaman mengenai manfaat program, peserta juga memperoleh informasi mengenai prosedur pendaftaran, tata cara pembayaran iuran, serta mekanisme pengajuan klaim apabila terjadi kecelakaan kerja maupun risiko lainnya. Informasi tersebut dinilai sangat bermanfaat karena sebagian besar peserta belum pernah memperoleh sosialisasi secara langsung mengenai prosedur administratif BPJS Ketenagakerjaan.

Peningkatan literasi peserta juga terlihat dari kemampuan mereka menjelaskan

kembali manfaat masing-masing program BPJS Ketenagakerjaan pada akhir kegiatan. Dalam sesi diskusi, peserta mulai memahami bahwa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bukan hanya memberikan perlindungan ketika terjadi kecelakaan kerja, tetapi juga merupakan bentuk investasi jangka panjang melalui program Jaminan Hari Tua.

Pembahasan Hasil Kegiatan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di Kecamatan Sepatan Timur merupakan salah satu bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat melalui peningkatan literasi mengenai BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah (BPU). Sasaran kegiatan adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sebagian besar termasuk pekerja sektor informal dengan tingkat risiko kerja yang cukup tinggi. Kelompok pekerja ini memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah, namun pada kenyataannya masih banyak yang belum memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara optimal.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, diketahui bahwa sebagian besar peserta belum memahami secara menyeluruh mengenai manfaat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan BPU. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian peserta hanya mengetahui bahwa BPJS identik dengan pelayanan kesehatan sehingga belum memahami bahwa BPJS Ketenagakerjaan memiliki fungsi yang berbeda, yaitu memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja, kematian, dan jaminan hari tua. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat literasi jaminan sosial di kalangan pelaku UMKM masih relatif rendah sehingga diperlukan kegiatan edukasi secara berkelanjutan.

Pelaksanaan penyuluhan memberikan perubahan positif terhadap pemahaman peserta. Setelah memperoleh materi, peserta mulai memahami bahwa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bukan hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan finansial yang dapat meminimalkan risiko ekonomi apabila terjadi kecelakaan kerja ataupun kehilangan sumber pendapatan akibat meninggal dunia maupun memasuki usia tidak produktif. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa penyampaian materi yang dilakukan melalui metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab mampu meningkatkan pengetahuan peserta secara efektif.

Peningkatan literasi peserta juga terlihat dari meningkatnya pemahaman mengenai

manfaat Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Sebelum mengikuti penyuluhan, sebagian peserta beranggapan bahwa biaya pengobatan akibat kecelakaan kerja sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi. Setelah mendapatkan penjelasan mengenai cakupan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), peserta memahami bahwa program tersebut memberikan perlindungan berupa biaya perawatan medis, santunan selama tidak mampu bekerja, hingga santunan apabila terjadi cacat tetap maupun meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Informasi tersebut memberikan rasa aman bagi pelaku UMKM yang setiap hari menjalankan aktivitas usaha dengan berbagai risiko.

Selain JKK, materi mengenai Jaminan Kematian (JKM) juga memperoleh perhatian besar dari peserta. Banyak pelaku UMKM yang sebelumnya belum mengetahui bahwa ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan berhak memperoleh santunan apabila peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Melalui penyuluhan ini, peserta memahami bahwa manfaat Jaminan Kematian (JKM) dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga sehingga keberadaan program tersebut memiliki nilai sosial yang sangat penting bagi pekerja sektor informal.

Materi mengenai Jaminan Hari Tua (JHT) menjadi salah satu topik yang paling banyak didiskusikan. Sebagian besar peserta mengaku belum memahami bahwa iuran yang dibayarkan setiap bulan akan menjadi tabungan jangka panjang yang dapat dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah memperoleh penjelasan mengenai mekanisme pengelolaan dana JHT, peserta mulai menyadari pentingnya memiliki persiapan finansial untuk masa depan. Pemahaman ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran peserta untuk mempertahankan status kepesertaan agar tetap aktif.

Dalam kegiatan penyuluhan juga diperkenalkan penggunaan aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) sebagai media pelayanan digital BPJS Ketenagakerjaan. Peserta diberikan penjelasan mengenai cara melakukan registrasi akun, mengecek status kepesertaan, melihat saldo Jaminan Hari Tua (JHT), hingga memperoleh informasi mengenai manfaat program. Pemanfaatan teknologi digital dinilai mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memudahkan peserta memperoleh informasi secara mandiri tanpa harus datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan.

Keberhasilan kegiatan ini tidak hanya diukur dari meningkatnya pemahaman

peserta, tetapi juga dari tingginya partisipasi selama proses diskusi. Peserta aktif mengajukan pertanyaan mengenai prosedur pendaftaran, mekanisme pembayaran iuran, tata cara klaim, serta solusi apabila status kepesertaan menjadi tidak aktif. Antusiasme tersebut menunjukkan bahwa materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM sehingga kegiatan PKM memberikan manfaat yang nyata.

Dari sisi akademik, hasil kegiatan ini sejalan dengan konsep literasi yang menjelaskan bahwa peningkatan pengetahuan merupakan langkah awal dalam membentuk perubahan sikap dan perilaku seseorang. Semakin tinggi tingkat literasi masyarakat mengenai suatu program, semakin besar pula kemungkinan masyarakat untuk memahami dan memanfaatkan program tersebut secara optimal. Hal ini didukung oleh Kaiser dan Menkhoff (2020) yang menunjukkan bahwa pendidikan keuangan dapat meningkatkan pengetahuan dan berdampak pada aspek perilaku keuangan. Selanjutnya, Ashshiddiqi dan Rahmat (2022) menegaskan bahwa pengetahuan keuangan memiliki peran dalam membentuk perilaku pengelolaan keuangan pelaku UMKM, sedangkan Yuliana, Nurjannah, dan Sa'diyah (2023) menunjukkan bahwa literasi keuangan dan sikap keuangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap perilaku pengelolaan keuangan pada pelaku UMKM. Oleh karena itu, kegiatan edukasi seperti penyuluhan menjadi salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan pemahaman dan mendorong partisipasi masyarakat terhadap program BPJS Ketenagakerjaan.

Hasil kegiatan ini juga mendukung tujuan pemerintah dalam memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada sektor informal. Pelaku UMKM merupakan kelompok pekerja yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, namun masih memiliki tingkat kepesertaan BPJS yang relatif rendah. Melalui peningkatan literasi, diharapkan semakin banyak pelaku UMKM yang menyadari pentingnya perlindungan jaminan sosial sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan usaha dan kesejahteraan keluarga.

Kegiatan PKM ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah. Meskipun perubahan perilaku kepesertaan memerlukan waktu dan pendampingan lebih lanjut, kegiatan penyuluhan telah menjadi langkah awal yang penting dalam membangun budaya perlindungan sosial di kalangan pekerja sektor informal. Ke depan, kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara

berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, serta perguruan tinggi agar manfaat yang diperoleh masyarakat dapat semakin optimal.

Faktor Pendukung dan Kendala

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berjalan dengan baik karena didukung oleh berbagai faktor. Dukungan dari pihak Kecamatan Sepatan Timur dalam penyediaan tempat kegiatan dan koordinasi dengan pelaku UMKM menjadi salah satu faktor utama keberhasilan kegiatan. Selain itu, antusiasme peserta yang tinggi selama mengikuti penyuluhan dan sesi diskusi menunjukkan bahwa materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Penggunaan media presentasi dan penyampaian materi secara komunikatif juga membantu peserta memahami informasi mengenai BPJS Ketenagakerjaan dengan lebih mudah.

Di sisi lain, terdapat beberapa kendala selama pelaksanaan kegiatan. Perbedaan tingkat pendidikan dan pengalaman peserta menyebabkan kemampuan memahami materi tidak sama. Selain itu, keterbatasan waktu membuat tim belum dapat memberikan pendampingan secara lebih mendalam kepada setiap peserta, khususnya terkait proses pendaftaran dan penggunaan aplikasi Jamsostek Mobile (JMO). Meskipun demikian, kendala tersebut dapat diatasi melalui sesi diskusi, tanya jawab, serta pemberian kesempatan kepada peserta untuk berkonsultasi secara langsung setelah kegiatan selesai.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan tema “Peningkatan Literasi BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah (BPU) pada UMKM Kecamatan Sepatan Timur” telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Kegiatan ini memberikan edukasi kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT), serta mekanisme kepesertaan dan pembayaran iuran.

Pelaksanaan kegiatan melalui metode ceramah, diskusi interaktif, dan tanya jawab mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai manfaat BPJS Ketenagakerjaan BPU, pentingnya menjaga kepesertaan tetap aktif, serta pemanfaatan aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) untuk memperoleh informasi dan layanan. Antusiasme peserta yang terlihat dari keaktifan dalam diskusi dan sesi tanya jawab menunjukkan bahwa materi

yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pelaku UMKM.

Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini berhasil meningkatkan literasi dan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko usaha dan kehidupan keluarga. Peningkatan pemahaman tersebut diharapkan dapat mendorong partisipasi yang lebih aktif dan berkelanjutan dalam program BPJS Ketenagakerjaan BPU, sehingga mendukung terciptanya perlindungan sosial yang lebih luas bagi pelaku UMKM di Kecamatan Sepatan Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisty, M. R., Mundandar, J. M., & Sumertajaya, I. M. (2023). Factors influencing informal workers' registration for social security: A comparative analysis between Indonesia and Taiwan. *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen*, 9(2), 523–535.
- Anwar, R. F., Mulyati, H., & Rahmawati, W. J. (2023). Kesadaran konsumen dan niat membeli jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja sektor informal. *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen*, 9(2), 604–616.
- Ardianingsih, A., Langelo, J. S., & Wicaksono, P. (2021). Analisis kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja sektor informal di Kota Pekalongan. *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, 19(2), 8.
- Ashshiddiqi, M. T., & Rahmat, T. (2022). Optimizing the financial management behavior of MSME actors through digital financial knowledge in the digital era. *International Journal of Nusantara Islam*, 10(1).
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Profil Industri Mikro dan Kecil 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPJS Ketenagakerjaan. (2023). *Annual Report 2023: Elevating Member Experience for Sustainable Growth*. Jakarta: BPJS Ketenagakerjaan.
- International Labour Organization. (2022a). *Extending Social Protection Coverage to Informal Economy Workers: What Workers' Organizations Need to Know*. Geneva: International Labour Organization.
- International Labour Organization. (2022b). *Socioeconomic Impact of the COVID-19 Pandemic in Indonesia: Labour Market Analysis and Policy Recommendation*. Jakarta: International Labour Organization.
- International Labour Organization. (2022c). *World Employment and Social Outlook: Trends 2022*. Geneva: International Labour Organization.
- International Labour Organization. (2024). *Extending Social Protection to Workers in Micro and Small Enterprises: Lessons from International Experience*. Geneva: International Labour Organization.
- Kaiser, T., & Menkhoff, L. (2020). Financial education in schools: A meta-analysis of experimental studies. *Economics of Education Review*, 78, 101930.
- Tarisha, A., Ardi, K. H., Fatkhurrahman, I. N., & Leon, F. M. (2021). Financial literacy on saving behavior in MSMEs with social influence as an intervening variable. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum*, 5(2).
- Yuliana, M., Nurjannah, D., & Sa'diyah, C. (2023). The effect of financial literacy, personality, and financial attitude on financial behavior management in Malang SMEs. *Jurnal Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan*, 3(2).